

HARDA KISWAYA JADI PLH BUPATI SLEMAN

Terimakasih Pak Sri Purnomo - Bu Muslimatun

SLEMAN (KR) - Masa jabatan Bupati Sleman Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sri Muslimatun resmi berakhir Rabu (17/2) hari ini. Sambil menunggu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sleman terpilih, Sekretaris Daerah (Sekda) Harda Kiswaya ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh).

Serah terima jabatan Bupati Sleman Sri Purnomo kepada Plh Bupati Harda Kiswaya dilakukan di Pendapa Parasma. Harda Kiswaya menjabat Plh Bupati Sleman setelah ditunjuk oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui surat keputusan tertanggal 17 Februari 2021.

Harda berharap roda kepemimpinan di Sleman nanti tetap dapat berjalan seperti biasa. "Di te-

ngah transisi, saya memohon dukungan dari bapak-bapak Forkompinda agar roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sleman tetap berjalan dengan lancar," ujarnya.

Sementara itu Sri Purnomo yang didampingi Sri Muslimatun berharap di tengah pandemi Covid-19 ini nantinya jajaran aparat Pemkab Sleman akan dapat melanjutkan tugas untuk menangani pandemi, sembari bisa

menggerakkan sektor perekonomian di tahun 2021 sehingga dapat berjalan dengan baik. "Kami meminta maaf dan berterimakasih kepada Forkompinda dan seluruh jajaran yang ada di OPD karena selama 5 tahun telah bersama dalam suka dan duka menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sleman," ujarnya.

Usai serah terima jabatan, dilanjutkan dengan pengantaran ke rumah masing-masing. Sri Purnomo di Jaban Tridadi Sleman, sementara Sri Muslimatun di Blunyah Gede Sinduadi Mlati Sleman dan diterima oleh keluarga masing-masing. (Has)-f



Harda Kiswaya menandatangani surat serah terima jabatan disaksikan Bupati Sri Purnomo didampingi Wabup Sri Muslimatun dan Ketua DPRD Haris Sugiharta.

DAERAH RAWAN BENCANA

Puskesmas Cangkringan Perlu Jadi Rawat Inap

SLEMAN (KR) - Puskesmas Cangkringan perlu ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap. Mengingat Cangkringan merupakan daerah rawan bencana erupsi Gunung Merapi sehingga pelayanan kesehatan dasar sangat diperlukan untuk penanganan pertama.

Anggota Komisi D DPRD Sleman Yani Fathurrahman mengatakan, sekarang ini Puskesmas Cangkringan belum melayani rawat inap. Sementara kondisi wilayah Cangkringan merupakan daerah yang rawan bencana. "Kami pikir, Puskesmas Cangkringan perlu dinaikan menjadi puskesmas rawat inap. Tujuannya kalau ada yang butuh pertolongan pertama, bisa langsung ke sana," ujarnya kepada KR, Rabu (17/2).

Di samping itu, masyarakat Cangkringan mayoritas mata pencahariannya sebagai petani dan peternak. Dari segi ekonomi, masih banyak kalangan menengah ke bawah. Sehingga keberadaan puskesmas rawat inap sangat dibutuhkan masyarakat. "Jika ada masyarakat yang butuh perawatan medis cukup jauh kalau mau ke RSUD. Sementara kalau mau ke rumah sakit swasta, masyarakat berpikir soal biaya. Jadi ketersediaan puskesmas rawat inap kami rasa sudah mendesak di Cangkringan," ujarnya.

Memang dari segi lokasi, keberadaan Puskesmas Cangkringan saat ini kurang representatif karena dekat dengan sungai. Dinas Kesehatan dapat mencari lokasi lain untuk membangun puskesmas. "Ya memang kalau lokasi yang ada sekarang kurang representatif. Makanya kami punya saran mencari lokasi yang lain untuk membangun puskesmas yang lebih representatif dan aman

dari ancaman bahaya erupsi Merapi," saran Yani.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Sleman dr Joko Hastaryo MKes membenarkan jika Puskesmas Cangkringan belum rawat inap. Bagi masyarakat Cangkringan yang membutuhkan layanan kesehatan atau rawat inap, dapat mengakses layanan di Puskesmas Ngemplak 1. "Kami belum ada rencana itu (tingkatkan ke rawat inap). Untuk sementara masyarakat yang ingin rawat inap, bisa ke Puskesmas Ngemplak 1 dengan kondisi yang lebih aman," jelasnya.

Namun dengan adanya usulan atau masukan dari legislatif, pihaknya akan melakukan kajian. Apakah Puskesmas Cangkringan layak dinaikkan jadi rawat inap atau belum. "Nanti kami akan lakukan kajian dulu. Soalnya setiap kebijakan harus ada kajiannya," pungkas Joko. (Sni)-f

SRI PURNOMO PILIH JADI PETANI

Sri Muslimatun Kembali ke RS Sakina Idaman

SLEMAN (KR) - Usai mengabdikan sebagai Wakil Bupati, Sri Muslimatun mengaku tetap akan mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat. Khususnya dengan bidang yang selama ini digelutinya di bidang kesehatan.

"Saya akan kembali ke RS Sakinah Idaman, baik sebagai praktisi kesehatan maupun akademisi. Kalau dunia politik ya tetap juga saya jalankan, karena itu juga menjadi pilihan hidup yang saya jalani," kata Muslimatun kepada wartawan, Rabu (17/2). Seperti diketahui, Sri Muslimatun bersama Sri Purnomo telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sleman periode 2016-2021 terhitung 17 Februari 2021 ini.

Sri Muslimatun juga mengaku akan tetap jadi pelayan masyarakat, karena memang dari du-

lu sudah menjadi pelayan masyarakat. Hanya tempatnya saja yang berbeda, tetapi sasarannya sama yakni masyarakat. "Jadi praktisi kesehatan dan jadi wakil bupati itu sama-sama jadi pelayan masyarakat," tegasnya.

Mengingat saat ini sudah lepas dari jabatan wakil bupati, Sri Muslimatun pun akan lebih fokus kembali ke dunia lamanya yakni bidang kesehatan di RS Sakina Idaman. "Saya akan curahkan waktu 24 jam untuk melayani masyarakat di RS Sakina Idaman. Meski sebetulnya dulu juga masih mengurus rumah sakit itu meski waktunya tidak bisa seratus persen. Jadi saya tidak akan *jet lag*, karena bakal punya banyak kesibukan lagi," tegasnya.

Disinggung apakah akan kembali ke dunia politik? Sri Muslimatun mengaku tidak

bisa lepas dari dunia politik. "Dunia politik itu sudah jadi darah daging saya. Namun cara berpolitiknya tentu saja bakal berbeda, belum tentu langsung ke politik praktis. Ada banyak cara untuk berpolitik, namun saya lebih suka berpolitik yang beretika," jelasnya.

Sementara Sri Purnomo mengaku memilih jadi petani untuk mengisi kesibukannya setelah lengser dari jabatannya sebagai bupati. Untuk mewujudkan keinginannya, Sri Purnomo sudah menyewa lahan pertanian di wilayah Prambanan. Lahan pertanian itu dominan dengan tanaman jambu kristal, diselingi tanaman buah lainnya. Selain itu juga memiliki kegiatan lain dengan kolam ikannya.

"Menjadi petani meski sederhana dan mudah dilakukan, namun tetap penuh tantangan," ujarnya. (Has)-f

Polres Sleman Raih Penghargaan Pelayanan Prima

SLEMAN (KR) - Polres Sleman dibawah kepemimpinan Anton Firmanto SIK menerima penghargaan pelayanan publik kategori Pelayanan Prima predikat (A), kategori Sangat Baik tahun 2020. Penghargaan diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Mabes Polri, Selasa (16/2).

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto SIK, Rabu (17/2) mengatakan, Polres Kulonprogo di bawah kepemimpinan AKBP Tartono SH juga mendapatkan penghargaan yang sama. "Selain itu, Kemenpan juga memberikan penghargaan kepada 40 Polres/Polresta/Polrestabes/Metro dengan Predikat Sangat Baik (A-). Dari 40 Satker ini, Polresta Yogyakarta dan Polres Gunungkidul mendapat predikat tersebut," jelasnya.



Kapolda Sleman (kiri) dan Kapolda Kulonprogo saat mendapatkan penghargaan di Mabes Polri.

Rabu (17/2). Kabid Humas mengungkap, Kapolda Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada 12 Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Polri yang mendapat kategori Pelayanan Prima dengan predikat A.

Terpisah, Kapolda Sleman mengatakan, penghargaan merupakan buah dari

kerja keras personel Polres Sleman. Dimana mereka selalu berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. "Ini merupakan apresiasi yang luar biasa dan kami sangat bangga atas pencapaian ini. Tak lupa kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh personel Polres Sleman dan masyarakat di Sleman," tandasnya. (Ayu)-f

Dewan Bentuk 4 Pansus Raperda Inisiatif

SLEMAN (KR) - DPRD Sleman telah membentuk 4 panitia khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dewan. Keempat raperda tersebut untuk merevisi perda sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang.

Wakil Ketua DPRD Sleman Arif Kurniawan SAg MH menjelaskan, 4 pansus itu untuk membahas raperda pembinaan jasa konstruksi, perubahan perda No 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu perubahan Perda No 6 Tahun 2015 tentang parkir dan Raperda perubahan Perda No 1 Tahun 2015 tentang PPNS. "Pansus sudah kami bentuk. Sekarang masing-masing pansus sedang melakukan pembahasan raperda inisiatif tersebut," jelasnya kepada KR, Rabu (17/2).

Menurut Arif, raperda

inisiatif ini untuk merevisi peraturan daerah yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Berdasarkan penermatan

DPRD Kabupaten Sleman, 4 perda itu ada beberapa substansi yang perlu direvisi untuk disesuaikan dengan peraturan yang baru. (Sni)-f

MENYAMPAIKAN APRESIASI
ATAS DEDIKASI DAN SUMBANGSING

Drs. H. Sri Purnomo, M.Si.
DAN
Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes
SELAMA MENJABAT SEBAGAI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN
PERIODE 2016 - 2021

Fraksi PKS Kabupaten Sleman

Ketua : H. Agus Masudi, S.T. Anggota : Agus Riyanto, S.Si
Wakil Ketua : Hasto Karyantoro, S.I.P. Anggota : Hj. Sumaryatin, S.Sos., MA.
Sekretaris : Yani Fathu Rahman, S.Pd. Anggota : Muh Zuhdan, S.Pd. M.A.P.

ENTENG BERISI

BACA MINGGU PAGI HARI INI !!! MINGGU III FEBRUARI 2021

mau taha jogja? krjogja.com

SUMBANGAN DOMPET KR "COVID-19" REKENING BCA NO. : 126.556.5656

Siapa & Mengapa Imlek Terbatas Keadaan

Terinspirasi Aktifing Idola

Vindry Sekar Azzahra

Menanti Efektivitas PPKM Mikro

Posko Tangguh Covid-19

PLESETAN PAANTUN

MINGGUAN MINGGU PAGI

Jl. Margo Utomo / Jl. P Mangkubumi 40-46 Yogyakarta 55232
Telp. (0274) 565685 Redaksi ext-126 | Sirkulasi ext-117 | Iklan KR ext - 112/113

www.minggupagi.com minggupagi.kr@gmail.com
minggupagi.kr@gmail.com @SKMMinggupagi